

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA
BERBASIS TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN PLATFORM FINTECH
LENDING DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77
/POJK.01/2016 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh:

Aurellia Cecelia¹, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian – Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi dan klausula bakunya pada beberapa Perusahaan Platform Fintech Lending di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif, dan disimpulkan dalam bentuk deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 (POJK Nomor: 77/POJK.01/2016) dan UU No. 8 Tahun 1999

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

belum diimplementasikan di dalam Perjanjian – Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi pada beberapa Perusahaan Platform Fintech Lending

A LEGAL ANALYST OF PEER TO PEER (P2P) LENDING SERVICE PROVISION AGREEMENT IN PLATFORM FINTECH LENDING COMPANY ACCORDING TO REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY NUMBER 77/POJK.01/2016 CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY AND CONSUMER PROTECTION LAWS NUMBER 8 OF YEAR 1999

By:

Aurellia Cecelia³, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out, review, and analyze peer to peer (p2p) lending service provision agreement and the standardized clause at some of platform fintech lending company in Indonesia based on Regulation Of The Financial Service Authority number 77/POJK.01/2016 and Consumer Protection Laws Number 8 Of Year 1999. This legal research method is Normative-Empirical research, combines library and field research. The entire data that has been obtained will be processed and analyzed by qualitative methods, presented in descriptive form, and concluded in deductive form. The results of this legal research show that Regulation Of The Financial Service Authority number 77/POJK.01/2016 and Consumer Protection Laws Number

³ Undergraduate student in Civil Law, Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Civil Law, Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA BERBASIS TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN PLATFORM FINTECH LENDING DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77 /POJK.01/2016 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

AURELLIA CECELIA CIQUITA GINTING, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

8 Of Year 1999 has not been implemented in the peer to peer (p2p) lending service provision agreement and the standarized clause at some of platform fintech lending company in Indonesia.